

Vol. 5, Juni 2011
Tahun II

DAFTAR ISI

- 1 **SALAM REDAKSI**
- 2 **ANALISIS**
Calvinisme dan Dilema Demokrasi
- 4 **ULASAN PENELITIAN**
Pancasila dan Proteksi Kebebasan Beribadah
- 6 **ULASAN SEMINAR**
Integritas Kristen: Keniscayaan atau Ilusi?
- 7 **ULASAN SEMINAR**
Christian Ethics and Modern Medicine
- 8 **ARTIKEL**
Pancasila, Agama, dan Ranah Publik
- 10 **ARTIKEL**
Indonesia Lumbang Pangan Dunia?
- 12 **PUBLIKASI DAN KEGIATAN**

REDAKSI

Dewan Redaksi

Benyamin F. Intan
Nimrod Sitorus
Tandean Rustandy
Murniaty Santoso
Joko Prabowo
Jani Hermawan

Redaktur

Binsar A. Hutabarat
Dini Y. Rachman
R. Graal Taliawo
Adhya Kumara

Alamat

Jl. Raya Boulevard Barat
Plaza Pasifik B4, 73-75
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telepon: 021-45842220
Faks: 021-45854062
E-mail:
reformed.crs@gmail.com

CIMB Niaga
STEMI - Pusat Pengkajian
430.01.00201.005

PANCASILA, CALVINISME, & DILEMA DEMOKRASI



Gedung GPIB Jemaat Galilea Villa Galaxi, Kota Bekasi, yang disegel massa. Ironis, di dalam negara Pancasila, membangun tempat hiburan malam jauh lebih mudah ketimbang membangun rumah ibadah.

SALAM REDAKSI

Hari lahirnya Pancasila dirayakan tiap 1 Juni—hari ketika Presiden Soekarno pertama kali berpidato memperkenalkan Pancasila sebagai pilihan yang tepat dasar Indonesia merdeka di hadapan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pancasila kemudian dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar RI sebagai dasar Indonesia merdeka. Pancasila diakui menjiwai seluruh batang tubuh UUD 1945. Pancasila adalah pilihan bijak *founding fathers* untuk menjadi rumah bersama bagi beragam suku, budaya dan agama di negeri ini.

Setelah kemerdekaan, persoalan membumikan Pancasila yang menurut Soekarno digali dari kehidupan masyarakat Indonesia itu ternyata mengalami banyak hambatan. Pancasila mendapat rongrongan dari berbagai ideologi tandingan. Akibatnya, Pancasila dibiarkan “ter-onggok” di tempat sunyi. Pada era Reformasi banyak orang alergi menyebut Pancasila setelah menyaksikan penyimpangan terhadap Pancasila yang dilakukan pada era Orde Baru.

Peminggiran Pancasila di era Reformasi terlihat jelas dengan dicabutnya mata kuliah Pancasila

pada perguruan tinggi. Selanjutnya, intoleransi yang bertentangan dengan kepribadian Pancasila dengan pongah dielu-elukan oleh banyak orang di negeri ini, setidaknya itu terbukti melalui survei-survei yang pernah dilakukan berbagai lembaga survei di negeri ini.

Karena itu untuk menyegarkan ingatan kita akan pilihan pada Pancasila, Veritas Dei kali ini mengambil tema “Pancasila, Calvinisme, dan Dilema Demokrasi,” menyajikan pemikiran-pemikiran cerdas dan bijak bagaimana supaya demokrasi Pancasila yang ingin dibumikan di negeri ini tidak tererosok dalam dilema.

Setelah artikel analisis Dr. Stephen Tong tentang “Calvinisme dan Dilema Demokrasi,” redaksi mengulas artikel penelitian, “Proteksi Kebebasan Beragama” yang memotret kondisi kebebasan beragama di Indonesia saat ini. Setelah ulasan seminar “Integritas Kristen: Keniscayaan atau Ilusi” serta “Christian Ethics and Modern Medicine,” redaksi menurunkan artikel Dr. Benyamin Intan “Pancasila, Agama dan Ranah Publik,” dan ditutup dengan artikel Murniaty Santoso, M.Sc. “Indonesia Lumbang Pangan Dunia?” ■

Redaksi

CALVINISME DAN DILEMA DEMOKRASI

Pdt. Dr. Stephen Tong

Demokrasi yang marak pada abad-abad terakhir ini memiliki beberapa sumber. Pertama adalah Athena, sebuah kota sekaligus negara, yang menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, “demos” (rakyat), “kritos” (pemerintahan). Pandangan tersebut lalu dikembangkan oleh Calvin di Jenewa pada abad ke-16, hadir lah sistem politik yang sangat baru. Kemudian, pada akhir abad ke-18, cetusan demokrasi yang paling modern dikenal di Perancis, dari sana kemudian diekspor ke negara-negara lain.

Demokrasi yang diterapkan baik di Athena maupun di Perancis sesungguhnya belum memenuhi syarat pemerintahan demokrasi. Di Athena, penduduk yang diizinkan memberikan suara tidak lebih dari 30 persen. Perempuan, budak serta para tawanan yang dijadikan budak, dan orang kelas rendah tidak mendapat tempat dalam demokrasi Athena.

Demikian juga dengan demokrasi di Perancis, dirasuki oleh semangat balas dendam, kebencian akibat penindasan pemerintahan monarki yang absolutis, mengakibatkan rakyat dengan kemarahan dan kebencian besar, menghantam, merusak, dan menghancurkan penjara Bastille.

Pada peringatan ke-200 tahun revolusi Perancis, Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris ketika ditanya mengenai revolusi Perancis mengatakan, penggerak revolusi Perancis adalah bajingan-bajingan yang merebut kekuasaan dengan membuat kekacau-balauan, setelah merebut kuasa, dan terjadi kekacauan dalam



masyarakat mereka pun puas, itulah revolusi Perancis. Demokrasi Perancis menjunjung tinggi manusia dan kebebasan, namun tanpa ditunjang oleh ikatan moral yang sesuai dengan kebenaran.

Dilema Demokrasi

Semenjak Revolusi Perancis, semua bangsa yang tertindas mulai bergerak menumpas semua penindas-penindas demi mendapatkan kembali kedaulatan rakyat. Namun pada realitasnya, untuk menghadirkan demokrasi bukan persoalan mudah. Demokrasi bagaikan bayi dalam kandungan yang sulit untuk dilahirkan.

Pelaksanaan demokrasi menempuh jalan yang lama dan sulit, bagaikan kehamilan yang sudah amat tua dan sulit untuk tidak dilahirkan. Terkadang, kelahiran demokrasi mengakibatkan luka yang berat bagi induknya, membawa korban yang banyak di pihak rakyat, dan bukan mustahil, perjuangan membangun demokrasi menjadi suatu kecelakaan besar bagi bangsa itu. Itulah dilema demokrasi. Namun, apapun akibatnya, demokrasi harus tetap dilahirkan.

Sulitnya membangun demokrasi dialami oleh China. Dr. Sun Yat Sen sangat tersohor dalam usaha menegakkan demokrasi di China. Namun itu hanya berlangsung singkat. Hanya 11 tahun setelah Tiongkok memulai demokrasi, bangkitlah seorang tirani yaitu Mao Tse-Tung yang merebut tampuk kekuasaan dan kemudian mendirikan negara komunis. Pembunuhan demokrasi yang dilakukan Mao Tse-Tung mengakibatkan negara China mundur secara politik berpuluh-puluh tahun.

Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia saat ini, India juga mengalami perjalanan yang tidak mudah. Hal ini disebabkan karena India tidak memiliki bibit demokrasi. India menjalankan demokrasi karena Mahatma Gandhi menjalankan demokrasi di India. Dan perjuangan demokrasi di India mengalami tantangan yang tidak mudah dari Hinduisme yang membagi manusia berdasarkan kasta, sehingga hak asasi manusia menjadi terbagi-bagi. Perjuangan Gandhi menegakkan demokrasi di India sesungguhnya dipengaruhi kekristenan.

Sulitnya membangun demokrasi itu terkait dengan keharusan adanya faktor-faktor lain yang ikut andil dalam membentuk demokrasi, salah satunya adalah supremasi hukum. Faktor-faktor itu sesungguhnya ada dalam Calvinisme, dan itu terbukti dalam pembangunan demokrasi di Jenewa. Calvinisme adalah solusi untuk mengatasi dilema demokrasi.

Calvinisme bukan hanya menggarap doktrin. Karena yang disebut doktrin adalah kepercayaan yang dipegang oleh orang berdasarkan ketaatan ke-

pada Firman Tuhan yang mengakibatkan normalisasi relasi, secara vertikal antara manusia dengan Allah dan secara horizontal antara manusia dengan manusia.

Kenapa Calvinisme? Karena Calvinisme menjelaskan manusia secara tuntas. Kitab Suci menulis, manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. *Men are created after the image and the likeness of God. We should be like God, because we are created after His image.* Setiap presiden yang memerintah, setiap penguasa yang berkuasa, harus menghargai serta menghormati Tuhan, dan mengerti siapa manusia yang diperintah. Reformed Theology berhasil menjelaskan *image and the likeness of God* dengan sangat tepat.

Menurut Reformed Theology, Efesus 4:24, menjelaskan bahwa manusia baru yang dicipta menurut peta dan teladan Allah mempunyai keadilan dan kesucian yang benar. Jadi, kesucian, keadilan, kebenaran merupakan tiga pilar penting dalam membentuk masyarakat. Masyarakat kalau tidak ada kebenaran, itu masyarakat apa? Barbar. Kalau tidak ada keadilan, itu masyarakat apa? Barbar. Masyarakat yang tidak ada kesucian, itu masyarakat apa? Masyarakat yang seperti binatang. Ketiga pilar itu menjadikan

kemungkinan manusia berkomunitas secara beres.

Selanjutnya, keadilan mengakibatkan adanya pengadilan, adanya hukum, adanya hakim, adanya jaksa, adanya Mahkamah Agung, dsb. Karena sifat hukum dan kesucian menjadi dasar bermoral dan beretika yang berjalan di dalam segala hal yang beres dan senonoh. Dan dua hal ini didasarkan pada satu fondasi, yaitu kebenaran. Jadi *the truth as the foundation of the righteousness, and the truth as the foundation of the holiness.* Maka keadilan yang sungguh-sungguh, kesucian yang sungguh-sungguh, menyebabkan masyarakat itu beres. Ketiga sifat ini membentuk manusia menjadi makhluk yang berbeda dari semua binatang.

Apabila pemerintah itu suci, adil, dan benar maka pemerintahan itu akan menjadi baik. Pemerintah yang memahami bahwa semua yang diperintahnya adalah makhluk Tuhan dan dicipta dengan pengertian kebenaran, menuntut adanya keadilan, dan pelaksanaan kesucian. Dan ini menjadi peta Allah yang menjadi dasar yang diperintah dan yang memerintah. Itu sebabnya Calvinisme akhirnya memengaruhi seluruh dunia untuk menuntut demokrasi.

Calvinisme menuntut, melaksanakan dan memengaruhi bahwa ide yang paling tinggi untuk demokrasi bukan pada keinginan kekuasaan semata. Soren Aabye Kierkegaard mengatakan rakyat sebagai ide tertinggi dari demokrasi. Semua orang boleh saja mengatakan mengikuti amanat rakyat. Tapi siapa rakyat itu? Kierkegaard juga mengatakan bahwa mayoritas dan massa adalah anjing yang tidak ada pemiliknya.

Itu menjadi peringatan penting untuk siapapun yang menganggap diri mewakili rakyat. "Kapan rakyat memilih kamu mewakili dia?" Hanya karena ambisi banyak orang mau memengaruhi rakyat, jadi bukan karena rakyat yang memengaruhi. Mereka yang memengaruhi lalu mengklaim diri mewakili rakyat. Itu berarti suatu perwakilan yang mewakili ketidakjujuran, ketidakbenaran, dan ketidakadilan. Itulah sebabnya demokrasi dibenci oleh Plato, karena demokrasi telah membunuh gurunya, Sokrates. Demokrasi setidaknya telah menyebabkan kematian dua orang yang paling penting di dunia ini, Sokrates dan Yesus Kristus. Itulah dilema demokrasi. ■ (Ulasan Pdt. Dr. Stephen Tong, dalam Seminar RCRS "Calvinisme, Demokrasi, dan Penerapannya di Indonesia")

DVD

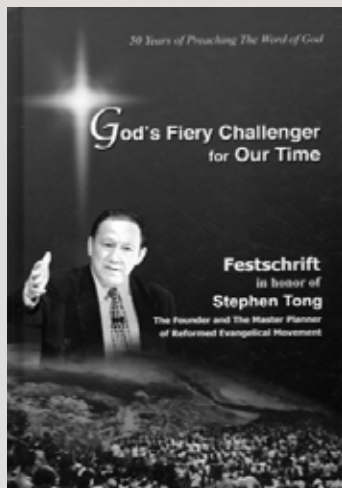


Seminar Nasionalisme dan Pluralisme Global

Pdt. Dr. Stephen Tong,
K.H. Abdurrahman Wahid,
Drs. Christianto Wibisono

Harga: Rp75.000

BUKU



Judul:
God's Fiery Challenger for Our Time
(Festschrift in honor of Stephen Tong)

Editor:
Dr. Benyamin F. Intan

Penerbit:
STEMI & RCRS, 2007

Tebal:
762 halaman

ISBN:
978-9791620314

Harga:
Rp200.000.-

PANCASILA DAN PROTEKSI KEBEBASAN BERIBADAH

Minimnya proteksi kebebasan beribadah di negeri ini mengakibatkan banyak nyawa melayang, serta menelan kerugian harta benda yang tidak sedikit. Kondisi ini mestinya tidak boleh diterima sebagai takdir, karena taruhannya amat besar, yakni disintegrasi bangsa. *Founding fathers* negeri ini dengan tegas memproklamkan bahwa agama memiliki posisi terhormat di negeri ini, hak beragama dan beribadah adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam kondisi apapun, dan itu dilindungi oleh Pancasila dan UUD 1945.

Lemahnya proteksi kebebasan beribadah, apalagi ditambah sulitnya mengurus ijin mendirikan rumah ibadah tak terbayangkan sebelumnya dalam benak Pdt. Pesta Silalahi, yang mengabdikan diri sebagai Pendeta di Gereja Kristen Indonesia (Gekindo) jemaat Jati Mulya, apalagi setelah empat tahun pelayanan ia ditinggal sang suami yang lebih dahulu menghadap Sang Khalik. Sebagai orang tua tunggal ia bukan hanya harus bertarung memenuhi kebutuhan keluarganya, namun secara bersamaan harus memikul tugas menggembalakan jemaat yang baru saja dirintisnya.

Tahun 1989, Pdt. Silalahi memulai pelayanannya di Jati Mulya, pada sebuah rumah di Taman 8, No. 195 yang dibelinya untuk tempat beribadah, dan itu dilaporkan secara terbuka kepada bagian pemasaran perumahan tersebut. Ketenangan beribadah dinikmati oleh jemaat Gekindo Jati Mulya hingga 1991. Meledaknya peristiwa Situbondo (pembakaran gereja-gereja di Situbondo) yang



Peneliti Senior RCRS, Pdt. Binsar A. Hutabarat (kanan) mewawancarai Pdt. Pesta Silalahi, pendeta di Gereja Kristen Indonesia (Gekindo) Jati Mulya.

mengakibatkan tewasnya pasangan pendeta GPPS (Gereja Pentakosta Pusat Surabaya) serta seorang pelayan gereja, berdampak jauh hingga ke Bekasi. Hubungan antara masyarakat sekitar dan jemaat Gekindo juga terimbas panasnya hubungan antar agama di Situbondo. Tertolong oleh netralitas pemerintah yang berusaha memproteksi kebebasan beragama dan beribadah, hingga tahun 1997 jemaat Gekindo masih bisa beribadah di Jati Mulya.

Usaha untuk membangun hubungan yang harmonis antar agama, khususnya dengan masyarakat sekitar gereja dilakukan dengan serius oleh jemaat Gekindo dengan dikomandoi oleh Pdt. Silalahi sebagai pimpinan jemaat. Jemaat Gekindo berusaha mendukung masyarakat sekitar dalam memenuhi kewajiban agama mereka, bahkan tidak segan-segan memberikan bantuan materi sekalipun. Dan semua itu dilakukan tanpa pamrih, sebagai sesama warga bangsa, sampai akhirnya mereka harus henggang dari tempat ibadah yang dibeli dengan uang hasil jerih lelah mereka sendiri.

Tepatnya Minggu, 17 Agustus 1997, pada peringatan ke-52 kemerdekaan RI, selepas upacara penaikkan bendera yang digelar di depan gereja, tiba-tiba datang sejumlah besar massa, entah dari mana asalnya, melarang jemaat Gekindo untuk beribadah di dalam gedung gereja mereka. Setelah kejadian itu, jemaat Gekindo tidak bisa lagi beribadah di tempat tersebut, dan mereka beribadah dengan cara berpindah-pindah. Intimidasi kerap mereka hadapi, mulai dari pemanggilan RT, RW, sampai pada kunjungan sekelompok orang yang sengaja membuat kegaduhan di saat mereka sedang beribadah, itu berlangsung selama dua tahun, sebuah kesabaran yang amat mengagumkan, sekaligus sebuah kejadian memilukan di negeri yang terkenal sebagai tempat persemaian yang subur bagi agama-agama, yang tersohor dengan semangat bhinneka tunggal ika, berbeda-beda namun satu.

Tahun 1999, Gekindo bersama dengan HKBP Getsemani Jati Mulya, membeli sebidang tanah seluas 1000

m², di Melati Ujung nomor 12, RT 002 RW 07, Desa Jati Mulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Di lokasi itulah dibangun dua buah gedung Gereja, yakni Gekindo dan HKBP Getsemani, pengurusan izin mendirikan bangunan dilakukan bersamaan dengan pembangunan kedua gedung gereja tersebut karena kedua gereja tersebut telah memenuhi syarat jumlah jemaat, Gekindo (150 KK), dan HKBP Getsemani (450 KK). Sampai tahun 2005, Gekindo dan HKBP dapat beribadah dengan baik di tempat tersebut meski belum juga memiliki izin pendirian rumah ibadah, di seberang jalan gereja tersebut terdapat juga Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) jemaat Elshadai.

Pada 9 September 1999, Gekindo dan HKBP Getsemani menghadapi persoalan baru. Di tanah fasilitas sosial yang berada di depan bangunan kedua gereja tersebut dibangun se-

buah pesantren, tidak tanggung-tanggung pemerintah daerah kemudian menutup jalan masuk kendaraan ke gereja tersebut. Jemaat kedua gereja itupun harus rela datang beribadah dengan menggunakan kendaraan umum karena tidak ada lagi lahan parkir. Kemudian puncaknya tanggal 30 Oktober 2005, tiga gereja yang berada di jalan Melati Ujung itu pun disegel pemerintah daerah, dan tempat tersebut tidak lagi diizinkan penggunaannya untuk beribadah.

Segala upaya telah dilakukan Gekindo, HKBP Getsemani, dan GPdI Elshadai, untuk dapat beribadah di tanah yang mereka beli dengan jerih lelah itu, namun pemerintah daerah tetap berkeras menutup gereja-gereja itu. Puncaknya, tiga gereja di Perumahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dibongkar dan disegel pemerintah daerah Kabupaten Bekasi pada 14 Juni 2008,

tanpa menyediakan tempat pengganti bagi ketiga jemaat itu untuk beribadah.

Pemerintah daerah jelas-jelas telah melanggar kebebasan beribadah yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Hingga kini Gekindo, dan HKBP Getsemani belum juga memiliki rumah ibadah yang berizin, mereka masih beribadah pada tempat ibadah sementara. Pdt. Silalahi mengatakan, "Kami sudah lelah menuntut hak kami melalui demo-demo, karena pemerintah tak pernah pedulikannya." Keputusan penda- ta yang memiliki tiga anak dan cucu tujuh itu cukup beralasan, karena usia yang sudah tidak muda lagi, namun, ini adalah sebuah ironi dalam negara yang konstitusinya mengatur dengan jelas mengenai hak kebebasan beribadah, dan hak mendirikan rumah ibadah. ■ (Binsar A. Hutabarat, Riedno Graal Taliawo)

Gereja yang Mengalami Gangguan Beribadah

Januari-April 2011

1. *Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Pangukan, RT 03 RW 10 Tridadi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Karena tekanan massa, Bupati Sleman melarang ibadah di gedung gereja, sehingga jemaat harus beribadah di tempat yang tidak memadai.*

2. *Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Pondok Aren, Tangerang. Selasa, 22 Februari 2011, gereja diserang warga sekitar. Setelah perundingan, pihak gereja boleh melaksanakan kebaktian, namun plang papan nama gereja harus diturunkan.*

3. *Gereja Katolik Paroki Kalvari, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pada Jumat, 25 Februari 2011, gereja didatangi segerombolan orang yang ingin menyerang gereja. Pengurus gereja menghubungi aparat keamanan (polisi) yang segera bergegas ke lokasi gereja, sehingga hal-hal yang tak diinginkan dapat dicegah.*

4. *Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus di Temanggung, Jawa Tengah. Selasa, 8 Februari 2011, gereja ini diserang massa yang tak puas dengan keputusan pengadil-*

an negeri dalam kasus penistaan agama yang menyangkut Antonius Richmond Bawengan asal Jakarta.

5. *Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Temanggung. Diserang massa pada hari yang sama dengan serangan atas gereja dalam kasus nomor 4. Massa membakar beberapa mobil yang ada di halaman gereja, dan menyerang sebuah sekolah yang ada di kompleks gereja.*

6. *Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Temanggung. Diserang massa pada hari yang sama dengan serangan atas gereja dalam kasus nomor 4 dan 5 di atas.*

7. *Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Jemaat Galilea, Vila Galaxi, Kota Bekasi. Rabu, 9 Februari 2011, massa menyerang dan menyegel gereja.*

8. *Gereja Katolik dan Sekolah Katolik di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Pada 21 Januari 2011 ada oknum yang mengerahkan massa untuk menolak kehadiran gereja, namun berkat kesigapan*

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) maka aksi massa tersebut dapat dihindarkan.

9. *Gereja atau Kapela Katolik Santo Antonius, Paroki Air Molek, Teluk Kuantan, Keuskupan Padang. Senin, 11 April 2011 dibakar massa.*

Tahun 2010

1. *Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kairos, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta.*

2. *Wisma Semadi Klender, Jakarta Timur, DKI Jakarta.*

3. *Gereja Kristen Baptis Jakarta (GKBJ) Pos Sepatan, Tangerang, Banten.*

4. *Gereja City Blessing Karawaci, Tangerang, Banten.*

5. *Gua Maria Rangkas Bitung, Banten.*

6. *Gereja HKBP Cinere, Depok, Jawa Barat.*

7. *Gereja Katolik Santa Maria Purwakarta, Jawa Barat.*

8. *Gereja Katolik Santo Johannes Baptista, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.*

9. *Gereja HKBP Filadelfia, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.*

bersambung ke halaman 11...

INTEGRITAS KRISTEN: KENISCAYAAN ATAU ILUSI?

Integritas Kristen: Keniscayaan atau Ilusi?" Itulah tema seminar RCRS yang digelar pada 4 Desember 2010 di Auditorium John Calvin, Kemayoran, Jakarta dengan pembicara tunggal Pdt. Dr. Benyamin F. Intan, Direktur Eksekutif RCRS. Selain di Jakarta, seminar dengan tema yang sama itu juga digelar di 9 kota besar lainnya di Indonesia, dan di luar negeri. Seluruh acara seminar tersebut dihadiri sekitar 2.500 peserta.

Intan dalam seminar tersebut menjelaskan definisi integritas Kristen dalam tiga argumentasi. Pertama, argumentasi ontologis, integritas Kristen dilandasi oleh perasaan takut karena mengasihi dan keinginan untuk menyenangkan Tuhan, bukan perasaan takut pada hukuman Tuhan, karena orang Kristen telah mengalami pengampunan dosa. Kedua, argumentasi epistemologis, yakni merupakan respon kepada Allah secara positif dengan hidup tidak bercela (*pure in heart*), bukan dengan mereka-reka yang jahat, baik secara sadar maupun tidak. Ketiga, argumen teologis-etis, akuntabilitas integritas orang Kristen adalah Tuhan Allah dan firman-Nya, serta dunia yang akan datang. Ketiganya ini tidak bisa ditipu. Jadi, akuntabilitas integritas tidak hanya disandarkan pada pengujian publik, hukum, teknologi, dan waktu.

Singkatnya, Intan menyimpulkan, integritas artinya menjalankan panggilan Tuhan dengan tidak bersembunyi, transparan, tidak bercela, artinya hatinya tidak terbagi, tidak mendua, betul-betul ditujukan hanya kepada Tuhan. Karena itu hidup berintegritas adalah sebuah proses, suatu komitmen yang hidup di mana Allah berdiri



Seminar RCRS "Integritas Kristen: Keniscayaan atau Ilusi?" Sabtu, 4 Desember 2010, pembicara: Pdt. Dr. Benyamin F. Intan, dihadiri oleh sekitar 850 peserta.

sebagai saksi.

Kehidupan berintegritas bagi orang Kristen menurut Intan adalah keharusan karena Allah adalah pribadi yang berintegritas. Manusia sebagai *image of God* harus menyatakan sifat-sifat Allah, yakni hidup yang berintegritas. Dosa memang telah menghancurkan integritas manusia, namun dalam anugerah Allah ada kuasa penebusan yang menyucikan manusia dan memberikan hidup baru. Sebagaimana tertulis dalam Efesus 2:10, "Karena kita ini buatan Allah (*common grace*), diciptakan dalam Kristus (*saving grace*), untuk melakukan perbuatan baik (*ministerial grace*)." Inilah integritas Kristen.

Lebih jauh Intan juga memaparkan bahwa integritas Kristen mencakup keseluruhan aspek hidup, bukan hanya pada wilayah tertentu (*primary territory*). Misalnya seorang dosen dinilai berintegritas dari segi akademis karena tidak pernah melakukan plagiat, padahal ia ketahuan berselingkuh dengan mahasiswanya. Menurut padangan Kristen, dosen tersebut be-

lum layak disebut berintegritas.

Tuntutan menjalankan integritas Kristen tentu saja bukan tanpa tantangan. Semua manusia tidak mungkin tidak berbuat dosa, dan Tuhan mengizinkan manusia bisa jatuh supaya kemudian dalam pemeliharaan Tuhan hidup bertumbuh. Seperti Markus yang pernah diizinkan Tuhan jatuh dengan meninggalkan pelayanan, tetapi kemudian Tuhan membangkitkan dia untuk kembali melayani Tuhan. Ini tidak berarti orang Kristen boleh berbuat dosa dengan alasan supaya bertumbuh, sebab "Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?" (Roma 5.20b, 6.1-2).

Meskipun tuntutan hidup berintegritas adalah tuntutan yang tidak mudah, itu bukanlah mustahil. Tuhan telah memberikan potensi pada orang Kristen untuk dapat memenuhinya. Tuhan telah berjanji memberikan kemampuan untuk mengatasi pencobaan-pencobaan (I Kor. 10:13). Dengan demikian, integritas bukan ilusi. ■ (Binsar A. Hutabarat, Dini Y. Rachman)

CHRISTIAN ETHICS AND MODERN MEDICINE

Perkembangan kemajuan biomedis dan teknologi pada beberapa dekade terakhir ini amat spektakuler.

Perkembangannya bahkan melampaui konsep-konsep yang ada dalam sains, filosofi, dan teologi. Seperti kemungkinan melakukan kloning, rekayasa genetika dan terapi inti sel (*stem cell*) yang menandai terbitnya fajar pengobatan regeneratif. Karena penemuan-penemuan ilmiah tersebut berdampak besar pada kehidupan manusia maka muncullah pertanyaan-pertanyaan moral dan etika mengenai hal itu.

Mengingat pentingnya jawaban atas pertanyaan moral dan etika mengenai penemuan ilmiah tersebut maka Reformed Center for Religion and Society menggelar seminar dengan tema, "Christian Ethics and Modern Medicine," 30 April 2011 di Aula John Calvin, Reformed Millennium Center Indonesia, Kemayoran, Jakarta. Dengan pembicara utama Lip-Bun Tan, D.Phil. (Oxford), MBB Chir (Cambridge), seorang Rhodes Scholar, konsultan kardiologi di Leeds General Infirmary LGI, dan seorang Fellow of Royal College of Physician, UK. Pembicara lainnya Pdt. Dr. Stephen Tong, seorang filsuf, teolog, budayawan, dan pendiri RCRS, dengan moderator Pdt. Benyamin F. Intan, Direktur Eksekutif RCRS.

Menurut Lip-Bun Tan, melalui penelusuran sejarah medis dalam kehidupan gereja sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa Yesus adalah dokter terbesar yang pernah ada. Setidaknya ada 40 kejadian penyembuhan atau percakapan tentang penyembuhan yang dilakukan Yesus dalam kitab-kitab Injil. Laporan mengenai banyaknya penyembuhan yang di-



Dr. Lip-Bun Tan

lakukan oleh Yesus yang dicatat dalam kitab-kitab Injil meneguhkan bahwa penyembuhan medis sangat dekat dengan pelayanan Yesus, amat jelas, tak ada kontradiksi antara pelayanan medis dan pemberitaan Kabar Baik.

Peran medis dalam pelayanan gereja mulai berkurang pada abad ke-3 Masehi, sewaktu Kaisar Konstantin menjadikan agama Kristen sebagai agama negara. Bahkan pada abad ke-12 praktik penyembuhan medis terpisah dari pelayan gereja. Praktik penyembuhan medis dianggap sebagai tahayul yang bertentangan dengan pesan Kabar Baik.

Pelayanan medis kembali menjadi bagian pelayanan gereja sewaktu John Wesley di abad ke-18 menempatkan peran aktif penyembuhan dalam pelayanan Injil. Bahkan Henry Venn di abad yang sama secara aktif menggunakan medis untuk mendukung penginjilan di Asia dengan dibukanya rumah-sakit di bawah bendera yaysan kristen. Saat ini pemisahan antara pelayanan medis dan pelayanan Kristen tidak lagi terjadi.

Lebih jauh Lip-Bun Tan mengungkapkan, kalau tenaga medis saat ini memegang sumpah Hipokrates yang sering dipakai dalam dunia kedokteran, misalnya prinsip tidak menceleakai pasien, maka para tenaga medis tidak akan melakukan pelanggaran etika medis yang berdampak buruk bagi pasien, apalagi untuk tenaga medis yang memegang hukum utama dari Yesus, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi.

Untuk bersikap bijaksana merespon penemuan-penemuan ilmiah dalam dunia medis Lip-Bun Tan mengingatkan pentingnya orang Kristen memahami konsep kematian fisik yang diartikan tidak mampu aktif berelasi dengan lingkungannya. Dalam medis modern, kematian adalah kondisi dimana otak tidak lagi berfungsi secara aktif. Ini penting menjadi landasan untuk menjawab pertanyaan mengenai boleh tidaknya praktik aborsi, kloning, rekayasa genetika, dan terapi inti sel. Pertanyaan bagaimanakah orang Kristen harus menanggapi kasus euthanasia, atau membantu bunuh diri karena alasan sakit, atau pembuahan in-vitro, dimana sel sperma pria dan sel telur wanita dibuahi di luar rahim, juga dapat dijawab dengan dasar tersebut.

Penjelasan Lip-Bun Tan mengenai medis modern dalam terang firman Tuhan itu diteguhkan oleh Dr. Stephen Tong pembicara kedua yang secara terbuka mengakui betapa besarnya kontribusi positif tenaga medis yang takut akan Tuhan, yang mengenal kebenaran Firman Tuhan dengan baik, sebagaimana telah disumbangkan oleh Lip-Bun Tan. ■ (Mitra Kumara)

PANCASILA, AGAMA, DAN RANAH PUBLIK¹

Pdt. Dr. Benyamin F. Intan

“Mengapa Pancasila tidak mengadopsi konsep Barat tentang *naked public square* yang memprivatisasikan agama?” tanya Prof. Yvonne Haddad ketika penulis memberi kuliah “Religious Freedom in Indonesia” di Georgetown University 30 Maret 2011 lalu. Pertanyaan Prof. Haddad sangat beralasan mengingat akhir-akhir ini konflik bernuansa agama semakin meningkat di tanah air.

Sebagai produk ‘sekuler’, *naked public square* meniadakan kiprah agama di publik, alasannya karena agama tidak bakal menerima apa yang John Rawls katakan sebagai “fakta keberagaman” (*fact of pluralism*). Bagi Rawls, ketidakmampuan menerima fakta pluralisme akan mematikan pluralisme, dan mematikan pluralisme sama artinya dengan menghancurkan demokrasi. Itu sebabnya Rawls terpinggirkan menyelamatkan pluralisme agama yang ia percaya sebagai hal yang tidak mungkin terselesaikan di ruang publik. Solusi yang ditawarkan Rawls: masing-masing agama harus menahan diri, bertenggang rasa melalui “*the method of avoidance*,” dengan terpinggirkan dari publik (“The Idea of an Overlapping Consensus,” *Oxford Journal of Legal Studies* 7 (1987): hal. 1, 4, 12-13). Dengan demikian, kehadiran agama di wilayah publik lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya.

Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 men-



jembatani perbedaan ideologis antara *golongan kebangsaan* dengan konsep negara sekulernya dan *golongan Islam* yang pro negara agama. Konsep *naked public square* dari negara sekuler sangat pesimis terhadap peran agama di domain publik. *Clash of Civilizations* dari Samuel Huntington memberi peringatan, jika tidak was-was terhadap kiprah agama di publik, maka kita akan mengalami perang agama yang pernah terjadi di Eropa abad 16 dan 17, dalam skala global.

Negara agama dengan konsep *sacred public square*, sebaliknya, sangat optimis terhadap agama di ruang publik. Namun dibatasi hanya satu agama, yaitu agama negara (*official religion*), agama lainnya tidak punya hak berkiprah di publik. Kedua opsi ini menekan kebebasan. Itu sebabnya Pancasila menolak.

Mitos dan Bahaya

Meresponi Prof. Haddad, Pancasila pertama-tama mempertanyakan keberadaan *naked public square*. Dengan meminggirkan agama ke ranah privat, apakah ruang publik lantas “telanjang”—bebas dari pengaruh keagamaan? Setiap individu, menurut sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin lepas dari “keagamaan” dalam arti luas. Contoh: untuk lepas dari pengaruh agama, sekolah negeri di US meniadakan pelajaran agama, tapi anehnya, tetap mengajarkan evolusionisme, ateisme, yang notabene merupakan ‘agama sekuler’. Itu mitos, kata Roy Clouser, jika domain publik netral dari pengaruh keagamaan (Lih. Roy Clouser, *The Myth of Religious Neutrality: An Essay on the Hidden Role of Religious Belief in Theories*, University of Notre Dame Press 2005).

Masalah lain dari *naked public square*, yakni menyuburkan fundamentalisme. Agama tidak akan tinggal diam melihat proses privatisasi agama yang dilakukan *naked public square*. Perlawanan agama terhadap upaya marginalisasi, menurut Mark Juergensmeyer, dilakukan dalam bentuk “serangan balik” (*backlash*), dan seringkali mengandung apa yang Gilles Kepel katakan sebagai unsur “balas dendam” (*revenge*) (Lih. Mark Juergensmeyer, *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State*, University of California Press 1994, dan Gilles Kepel, *The Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the Mod-*

1. Bentuk ringkas artikel ini pernah dimuat di kolom Opini harian Seputar Indonesia (Sindo), Rabu, 1 Juni 2011.

ern World, The Pennsylvania State University Press 1994). Sehingga melahirkan radikalisme agama yang berpotensi mengganggu kepentingan umum. Itu sebabnya, penolakan terhadap privatisasi agama, menurut David Hollenbach, merupakan keniscayaan yang bersifat “*normatively objectionable*” (“Politically Active Churches: Some Empirical Prolegomena to a Normative Approach”, dalam Paul J. Weithman, ed. *Religion and Contemporary Liberalism*, University of Notre Dame Press 1997, hal. 301).

Dengan meminggirkan agama ke ranah privat, *naked public square* mengekang kebebasan beragama yang notabene bertentangan dengan sari Pancasila. Kehadiran sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa bukan semata-mata menjamin toleransi dan kebebasan beragama. Kalau hanya sekadar toleransi dan kebebasan beragama, sila kedua hingga kelima sudah menjamin. Keunikan sila pertama: menjalankan fungsi publik agama, atau dalam istilah Sukarno, mengedepankan “kepentingan [kemasyarakatan] agama” (“Lahirnya Pantja Sila”, hal. 33).

Dengan kata lain, konsep kebebasan beragama Pancasila, meminjam istilah Hollenbach, bukan hanya “*negative immunity*”—bebas dari cengkraman kekuasaan politik—tapi juga “*positive immunity*”—bebas menjalankan peran publik agama (“Public Reason/Private Religion? A Response to Paul J. Weithman”, *Journal of Religious Ethics*, Vol. 22, No. 1, 1994, hal. 42). Konsep *naked public square* hanya sebatas menjamin *negative immunity*, *positive immunity* diabaikannya. Itu sebabnya Pancasila menolak.

Sektarian dan Mandul

Menolak *naked public square* tidak berarti Pancasila lantas menerima *sacred public square*. Konsep *sacred public square* dari negara agama menyalahi spirit kebhinnekaan Pancasila

karena memperlakukan warga negara berdasarkan agama. Tolok ukur kebijakan negara bukan lagi asas keadilan, tapi agama. Dengan demikian, sirnalah sudah fungsi luhur negara sebagai pengayom kemaslahatan warga.

Negara agama anti demokrasi karena eksklusif dan diskriminatif. Eksklusif, karena bertumpu pada asas superioritas, prioritas, dan mayoritas dalam memperlakukan warga negara. Diskriminatif, karena membedakan-dakan warga.

Lengket dengan kekuasaan politik membuat agama mandul, hilang daya transendental, tak lagi kritis dan profetis, tidak lagi mampu menjaga koridor moralitas bangsa. Akibatnya, agama menjadi komoditas politik belaka, sekadar alat legitimasi kekuasaan negara. Singkatnya, dalam negara agama terjadi langkah bunuh diri baik terhadap agama maupun negara.

Peran Publik Agama

Menolak *naked public square* dan *sacred public square*, Pancasila mengedepankan konsep *civil public square*. Melalui konsep ini, Pancasila mengizinkan semua kepercayaan berkiprah di kehidupan publik. Tapi dengan syarat, harus bertolak dari realita kemajemukan agama. Artinya, kiprah agama di domain publik harus dilakukan pada aras *civil society*.

Agama di ranah publik pada level *civil society* mempunyai misi memberdayakan kekuatan potensial agama-agama dalam menjawab tantangan konkret kemanusiaan di dalam masyarakat. Fokusnya bukan pada isu dominasi antar kelompok agama, tetapi bagaimana agama-agama tampil sebagai kekuatan demokratis dalam mentransformasi kehidupan sosial-politik masyarakat.

Target agama di publik dalam wacana *civil society*, yakni bagaimana menjadikan kehidupan politik bangsa ber-

moral dan beretika. Masuk melalui sisi moral politik, acap disebut “politik moral”, kontribusi agama-agama diharapkan menerangi dan menggarami kehidupan politik bangsa agar keputusan-keputusan politik yang diambil bertanggung jawab. Sejauh berada di rel politik moral pada dataran *civil society*, maka peran publik agama akan positif, mampu menjadi kekuatan transformatif dan liberatif guna menyusun kehidupan sosial-politik yang demokratis. ■ (Penulis adalah Direktur Eksekutif RCRS)

DVD



Seminar HAM dan Kebebasan Beragama

Pdt. Dr. Stephen Tong,
Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.,
Prof. Drs. Dawam Rahardjo,
Pdt. Benyamin F. Intan, Ph.D.

Harga: Rp60.000



Antisipasi Krisis Global Bagi Indonesia

Dr. Stephen Tong (keynote),
Dr. Muhammad Chatib Basri,
Drs. Christianto Wibisono,
Dr. James T. Riady.

Harga: Rp100.000.-

INDONESIA LUMBUNG PANGAN DUNIA?²

Murniaty Santoso, M.Sc.

Sebagai anak bangsa kita bertanya, masihkah Indonesia disebut negara agraris mengingat negara ini masih mengimpor beras, kedelai, dan gandum dalam jumlah yang besar?

Sekalipun mi instan telah menjadi makanan pokok rakyat kita selain nasi, tahu, dan tempe, gandum bahan baku mi instan merupakan produk impor. Padahal, Indonesia mestinya berswasembada pangan mengingat potensi agrarisnya yang begitu menjanjikan.

Pertama, ketersediaan lahan pertanian yang luas. Indonesia memiliki lahan pertanian kurang lebih 30 juta hektar (Departemen Pertanian, 2009). Kedua, ketersediaan air yang melimpah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat curah hujan di Indonesia sangat tinggi rata-rata 2.000-3.000 milimeter per tahun.

Persoalannya, apakah pemerintah mempunyai rencana jangka panjang 10-20 tahun ke depan untuk mengatasi krisis pangan? Rencana tersebut secara komprehensif mencakup pembibitan, pemupukan, perbaikan struktur tanah, reformasi irigasi, penggunaan mesin besar, hingga panen. Bagaimana pula dengan penggunaan teknologi nano di sektor pertanian, reformasi pertanahan (*land reform*), modernisasi lahan pertanian menjadi berskala besar (di atas 10.000 ha), penyediaan infrastruktur penunjang, dan pemberian insentif pemerintah? Semua ini sangat penting dalam mencapai ketahanan pangan.



Belajar dari Brasil

Kita harus mencontoh Brasil. Brasil kini muncul sebagai lumbung pangan dunia. Negara ini 15 tahun lalu adalah negara pengimpor bahan pokok dalam jumlah masif, seperti kedelai, gandum, dan daging. Namun, tahun 2010 Brasil menjadi negara tropis pengeksport gandum terbesar di dunia, di mana gandum merupakan makanan pokok dunia hari ini. Tak hanya itu, Brasil juga menyuplai seperempat total kebutuhan kedelai dunia (hanya dari sekitar 6 persen lahan pertaniannya), pengeksport kapas terbanyak, penghasil gula tebu, kopi, dan etanol terbanyak di dunia (*The Economist*, 28/8).

Brasil memang memiliki lahan pertanian yang sangat luas, yaitu sekitar 400 juta hektar, namun negara ini hanya mendapatkan curah hujan sedikit. Curah hujan di Brasil Utara (daerah pertanian gandum dan kedelai) mencapai 975 milimeter per tahun, setara dengan curah hujan di Afrika yang kering, sedangkan curah hujan di Indonesia 2.000-3.000 mi-

limeter per tahun.

Apa yang membuat Brasil mampu membalikkan nasib? Brasil sangat memperhatikan peningkatan populasi dunia yang diproyeksikan naik dari 7 miliar saat ini menjadi 9 miliar pada 2050 sehingga perencanaan pertanian dibuat sesuai dengan asumsi tersebut.

Embrapa (Lembaga Penelitian Pertanian Brasil) secara kontinu mencari sistem pertanian yang cocok bagi Brasil sejak 1970-an. Mereka meneliti kondisi tanah, tingkat keasamannya, kebutuhan air dan campuran material untuk setiap jenis tanah, peningkatan intensitas tanaman pangan, serta pemilihan dan rekayasa benih. Semuanya memakan waktu dan percobaan panjang di laboratorium nanoteknologi Embrapa. Hasilnya, total nilai produksi pertanian Brasil selama periode 1996-2006 meningkat dari 26 miliar dollar AS menjadi 108 miliar dollar. Tak heran, padang sabana Brasil hijau dengan kedelai dan gandum.

Pekerjaan Rumah Kita

Belajar dari Brasil, penyebab utama Indonesia tidak bisa berswasembada pangan sekalipun memiliki potensi agraris yang menjanjikan adalah karena Indonesia tidak lagi punya rencana jangka panjang di bidang pertanian. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita I - VII) telah ditinggalkan bersama berlalunya Orde Baru. Padahal garis besar perencanaan semacam inilah yang membuat Brasil berhasil.

Perencanaan pertanahan jangka panjang (*land reform*) harus dibuat un-

2. Bentuk ringkas artikel ini pernah dimuat di kolom Opini harian Kompas, Jumat, 24 September 2010.

tuk jangka waktu paling tidak 10-20 tahun mendatang. Perencanaan ini harus dirancang agar melibatkan pemerintah dan swasta. Kedua pihak harus berfokus pada pertanian yang mengedepankan *economy of scale*. Untuk itu, pihak swasta harus diberi ruang untuk mengembangkan pertanian skala besar dan berteknologi tinggi.

Pertanian pola tradisional tidak lagi mumpuni untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik, dan tidak efisien, apalagi untuk mimpi menjadi lumbung pangan dunia. Mencontoh Brasil, perusahaan swasta di sektor pertaniannya terbukti mampu mengoptimalkan sekitar 15 persen dari total lahan pertanian dengan *economy of scale* yang sangat tinggi, produktivitasnya mencapai 365 persen!

Selain signifikannya swastanisasi

pertanian, penyediaan infrastruktur penunjang sektor pertanian penting dimasukkan dalam rencana jangka panjang tersebut. Sebagai perbandingan, Brasil membangun jalan-jalan raya untuk memuluskan distribusi bahan mentah dan produk pertanian dari pedalaman sampai ke pesisir. Brasil bahkan membangun sekolah-sekolah dan klinik-klinik kesehatan bagi keluarga petani. Peran pemerintah juga dapat diwujudkan dalam pemberian insentif pajak, tingkat bunga rendah, dan kemudahan birokrasi.

Mengenai pembibitan, perlu dikaji ulang apakah monopoli bibit menguntungkan petani dalam jangka panjang. Penelitian-penelitian untuk penyediaan bibit unggul yang paling produktif, tahan hama dan perubahan cuaca, serta sesuai dengan struktur tanah di Indonesia, sebaiknya didukung pemerintah. Bila petani masih

menanam bibit rapuh tak tahan perubahan cuaca seperti hari ini, maka gagal panen akan semakin mengorbankan rakyat banyak.

Perencanaan jangka panjang dengan mempertimbangkan multifaktor sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan oleh setiap negara yang ingin survive dari krisis pangan dunia. Brasil telah berbenah sejak 30 tahun lalu untuk menjadi lumbung pangan dunia hari ini. China sedang secara khusus mendorong penelitian agrikultur agar 1,3 miliar rakyatnya tak perlu lagi mengimpor gandum 10-20 tahun mendatang.

Ini saatnya Indonesia menata diri. Dan rencana jangka panjang adalah batu penjurunya. Maju Indonesiaku!

■ (Penulis adalah anggota Dewan Eksekutif RCRS, Alumnus MIT Sloan School of Management)

lanjutan dari halaman 5...

10. Gereja Kristen Pasundan (GKP), Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat.
11. Gereja Kristen Indonesia (GKI), Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat.
12. Gereja HKBP Pondok Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.
13. Gereja Protestan Indonesia Barat (GPiB) Galilea, Galaxi, Kota Bekasi, Jawa Barat.
14. Kapela Katolik Cirebon, Jawa Barat.
15. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat.
16. Gereja HKBP Karawang, Jawa Barat.
17. Gereja Katolik Stasi Santa Maria Immaculata, Kelideres, Jakarta Barat.
18. Wisma Penabur, Cibereum, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
19. Sekolah Katolik Santo Bellarminus, Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat.
20. Gereja Pantekosta Naragong, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.
21. Rumah Pastor Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat.
22. Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI), Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
23. Gereja Rebot Berea Raja Kemuliaan, Kecamatan Astananyar, Kota Bandung, Jawa Barat.

24. Gereja Pantekosta Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
25. Gereja HKBP Betania, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
26. Gereja Kemah Injili Indonesia Jemaat Filadelfia, Rancaekek, Jawa Barat.
27. Gereja Gereja Kristen Indonesia (GKI) Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
28. Gereja Pantekosta Jemaat Immanuel, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
29. Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Maranatha, Rancaekek, Jawa Barat.
30. Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
31. Gereja Katolik Stasi Rancaekek, Paroki Santa Odilia Cicadas, Jawa Barat.
32. Gereja Pantekosta di Temanggung, Jawa Tengah.
33. Gereja Kristen Jawa (GKJ) Sukoharjo, Kendal, Jawa Tengah.
34. Kapel Katolik Santo Jusup, Pare, Delangu, Jawa Tengah.
35. Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gembyog, Desa Ngemplak, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah.

36. Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI), Serengan, Solo, Jawa Tengah.
37. Kapel Gereja Katolik Kristus Raja, Desa Blimbing, Gatak, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah.
38. RS Katolik Brayat Minula, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.
39. Gua Maria Sriningsih, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah.
40. Gereja Katolik Alleluia, Keuskupan Agung Samarinda, Kalimantan Timur.
41. Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), Lampung.
42. Gereja Kristen GKSJ Jemaat Bonepute, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
43. Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
44. Gereja HKBP Sibuhun, Sumatera Utara.
45. Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sibuhun, Sumatera Utara.
46. Gereja HKBP Binanga, Sumatera Utara.
47. Gereja HKBP Asahan, Sumatera Utara.

Sumber: Forum Komunikasi Kristen Jakarta, 2011.

Publikasi & Kegiatan

DVD



Seminar Calvinisme, Demokrasi Global dan Penerapannya di Indonesia

Pdt. Dr. Stephen Tong (keynote)
Prof. Stephen Chan, Ph.D.
Muhammad A.S. Hikam, Ph.D.
Pdt. Benyamin F. Intan, Ph.D.

Harga: Rp60.000



Seminar RCRS “Calvinisme, Demokrasi, dan Penerapannya di Indonesia”, 31 Agustus 2006, Dr. M.A.S. Hikam, Dr. Benyamin F. Intan, Tandeand Rustandy, MBA (moderator), Prof. Dr. Stephen Chan, Dr. Stephen Tong.

BUKU



Title:
“Public Religion” and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis

Author:
Benyamin Fleming Intan.
(M.A. in Theological Studies, Reformed Theological Seminary, USA; M.A. in Religion, Yale University, USA; Ph.D. in Social Ethics, Boston College, USA)

Publisher:
Peter Lang, New York, 2006

Hardcover:
292 pages

ISBN:
978-0820476032

Price:
Rp600.000 (RCRS Secretariat)
US\$67.95 (Amazon.com)



Seminar RCRS “Antisipasi Krisis Global bagi Indonesia” 21 Juni 2008, Tandeand Rustandy, MBA., Dr. James Riady, Dr. Stephen Tong, Dr. Chatib Basri, Drs. Christianto Wibisono, Dr. Benyamin F. Intan.



Seminar RCRS “Christian Ethics and Modern Medicine” 30 April 2011, pembicara: Lip-Bun Tan, D.Phil., MBBChir., dihadiri sekitar 800 peserta.